

ANTARA BALI

Membangun Karakter Masyarakat Berbasis Pengetahuan



GUBERNUR BALI JADI ORANG PERTAMA DISUNTIK VAKSIN COVID-19

TIM YUSTISI
AWASI
PELAKSANAAN
PPKM
DI DENPASAR



Hal. 5

BADUNG PERLUAS
AKSES PASAR
KOPI LOKAL



Hal. 7

HAL
3

Gubernur Bangga Aksara Bali Bisa Mendunia

Gubernur Bali Wayan Koster merasa bangga aksara Bali bisa sejajar dengan aksara lainnya yang mendunia seiring dengan pendaftaran aksara Bali menjadi domain internasional ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

"Melalui Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018, semakin memudahkan mendaftarkan aksara Bali ke pengelola domain internasional ICANN, karena aksara Bali sudah resmi diakui pemerintah dan sudah mempunyai kekuatan sendiri," kata Koster di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Denpasar, dalam siaran persnya yang diterima ANTARA di Denpasar, Minggu.

Menurutnya, dengan didaftarkan aksara Bali sebagai salah satu aksara di Indonesia yang didaftarkan menjadi domain internet, maka menegaskan posisi aksara Bali di kancah internasional.

"Ini bisa disamakan juga dengan aksara Jepang, China atau Korea. Kita akan semakin dikenal di dunia," ujar Koster saat

memberikan sambutan pada acara Penyerahan Hadiah Lomba Desain Website Aksara Bali itu pada Sabtu (9/1).

Gubernur asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng itu pun menyatakan kebanggaannya banyak anak muda yang tergerak menekuni aksara Bali, dan terbukti pemenang lomba kali ini berasal dari generasi muda.

"Jika bukan kita yang melestarikan, lama-lama aksara Bali akan punah. Ilmu pengetahuan dan teknologi boleh berkembang, tetapi anak muda jangan terlalu terseret arus modernisasi, jaga terus kebudayaan dan kearifan lokal kita," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Koster pun menyinggung keseriusannya terhadap pelestarian aksara



Gubernur Bali Wayan Koster saat menyampaikan sambutan pada Penyerahan Hadiah Lomba Desain Website Aksara Bali di Fakultas Ilmu Budaya Unud (Antaraneews Bali/HO-Pemprov Bali/2021)

Bali melalui Pergub No 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bahasa Bali.

Keseriusan tersebut ditandai dengan peresmian penggunaan aksara Bali di bandara I Gusti Ngurah Rai pada tanggal 5 Okto-

ber 2018. Kemudian dilanjutkan dengan penggunaan aksara Bali di papan nama instansi baik pemerintah, BUMN maupun swasta.

Dalam kesempatan tersebut, ia berharap semua pihak bisa menggunakan dan mengimplementasikan penulisan aksara Bali dengan baik dan benar. **(ant)**

Putri Koster: PKK Terus Edukasi "Pesan Ibu" 3M



Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Koster bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dukuprovinsi Bali Putu Anom Agustina saat menjadi narasumber (Antaraneews Bali/HO-Pemprov Bali/2021)

KETUA Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ny Putri Suastini Koster mengatakan organisasi yang dipimpinnya terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penerapan "Pesan Ibu" 3M yakni mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak, sebagai salah satu upaya dalam pencegahan penyebaran

COVID-19.

"Pada masa pandemi COVID-19, PKK turut membantu dalam melakukan sosialisasi terkait imbauan maupun kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19," kata Putri Koster dalam talkshow bertajuk "Sinergitas Program dan Kegiatan PKK Tahun 2021" di Radio Gema

Merdeka, di Denpasar, Senin (11/1).

Selain itu, PKK juga berperan dalam membantu mewujudkan ketahanan pangan keluarga yakni program HATINYA PKK mengajak masyarakat untuk menata halaman rumahnya dan menanam tanaman yang bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari seperti sayur mayur, cabai, bawang dan sebagainya.

Dengan pelaksanaan program HATINYA PKK ini, selain keluarga akan memperoleh pangan yang sehat juga akan terwujud ketahanan pangan di dalam sebuah keluarga. "PKK akan terus bersinergi dengan semua pihak. PKK akan terus bergerak menyejahterakan masyarakat sesuai dengan program program yang disusun berdasarkan skala prioritas kebutuhan daerah berdasar pada 10 program pokok PKK," ujarnya.

Dengan pergerakan PKK yang masif, terstruktur dan bersinergi dengan semua komponen maka PKK akan dapat membantu

pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dukuprovinsi Bali Putu Anom Agustina mengatakan pergerakan PKK yang terstruktur jelas dari tingkat pusat hingga Dasa Wisma pendanaannya didukung oleh pemerintah dalam upaya memperlancar pelaksanaan program sesuai dengan 10 program pokok PKK.

Keberadaan PKK serta penggunaan anggarannya juga telah diatur dalam payung hukum yang sangat jelas. Sebagai salah satu wujud nyata sinergitas PKK Provinsi dengan kabupaten/kota se-Bali maka TP PKK Provinsi Bali memberi dukungan pendanaan pada kabupaten/kota di mana selanjutnya dana tersebut digerakkan sampai ke desa dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Dengan BKK tersebut maka PKK dari semua tingkatan akan bergerak bersama-sama. **(ant)**

Gubernur Bali Jadi Orang Pertama Disuntik Vaksin COVID-19

GUBERNUR Bali Wayan Koster menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19 Sinovac di Pulau Dewata, yang kemudian diikuti sejumlah pimpinan Forkompinda Bali, beberapa undangan dan perwakilan OPD pemprov setempat, di Rumah Sakit Bali Mandara, Kota Denpasar.

“Bapak Presiden sudah menggariskan kepada kita semua untuk mengikuti vaksinasi yang tujuannya untuk menumbuhkan kekebalan dalam tubuh, memperkecil risiko penularan, dan tentu kita berharap agar pandemi COVID-19 di Bali dan Indonesia segera berakhir,” kata Koster dalam Penganjangan Vaksinasi COVID-19 tingkat Provinsi Bali itu di Denpasar, Kamis.

Menurut Koster, kebijakan vaksinasi adalah pilihan yang terbaik dan bahkan Presiden Joko Widodo pada Rabu (13/1) sudah mengikuti vaksinasi dan langsung memberikan contoh

dan teladan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

“Saya harapkan masyarakat Bali dapat memahami dengan baik, dengan benar, dengan persepsi yang positif, dan tidak terpengaruh sebaran melalui media sosial, ini tolak, ini tidak setuju vaksin. Kita ikuti saja kebijakan pemerintah pusat karena pemerintah, apalagi Bapak Presiden sudah memberikan contoh,” ujarnya pada acara yang juga dihadiri Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati itu.

Gubernur Bali meyakini vaksin COVID-19 bisa betul-betul diterapkan secara bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah tidak akan mungkin untuk melakukan kebijakan yang mengorbankan rakyatnya.

Koster pun mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Kesehatan dan Badan Na-



Gubernur Bali Wayan Koster saat disuntik vaksin COVID-19 oleh petugas vaksinasi dalam acara Penganjangan Vaksinasi COVID-19 tingkat Provinsi Bali di RSBM (Antaraneews Bali/Rhisma/2020)

sional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar Bali diberikan prioritas untuk pemberian vaksin sehingga pariwisata Bali bisa segera pulih.

Pihaknya berterima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberikan porsi cukup

besar dan prioritas kepada Bali untuk pendistribusian vaksin COVID-19, untuk tahap pertama dan kedua sudah mencapai 51 ribu dosis/vial, sehingga harapannya bisa cepat Bali mencapai herd immunity 70 persen. **(ant)**

Gubernur Bali Harapkan Peningkatan Kerja Sama Dengan Jepang



Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima kunjungan Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar Katsumata Harumi (Antaraneews Bali/HO-Pemprov Bali/2021).

GUBERNUR Bali Wayan Koster mengharapkan hubungan kerja sama yang baik antara Jepang dengan Indonesia, khususnya Bali, tetap terjaga dan bahkan meningkat pada masa-masa mendatang.

“Saya harapkan ke depannya bisa ditingkatkan lagi, karena secara budaya, Jepang dan Bali ada kemiripan dan masyarakat Jepang

pun sangat menghargai budaya yang ada di Bali,” kata Koster saat menerima kunjungan Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar Katsumata Harumi di Rumah Jabatan Jayasabha, Denpasar, Selasa.

Selama ini jalinan kerja sama sangat baik kedua negara di antaranya terkait bidang pariwisata, ekonomi, pendidikan dan lainnya.

Gubernur kelahiran Desa Sembiran, Buleleng itu juga menyebut potensi kerja sama lain yang dapat dikembangkan kedua belah pihak yakni menyangkut penyediaan energi bersih berkelanjutan serta teknologi transportasi ramah lingkungan.

“Bali kini sangat berkepentingan dengan pengembangan energi bersih yang berkelanjutan serta transportasi ramah lingkungan melalui penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai. Jepang kita ketahui sangat maju di bidang tersebut,” ucapnya.

Sedangkan menyangkut penanganan pandemi COVID-19, Gubernur Koster menjelaskan bahwa Bali sangat konsen dalam penanganan dan pengendalian COVID-19 dengan melakukan pengetatan protokol kesehatan.

“Angka-angka (penanganan,red) kita terus membaik. Pencapaiannya sangat baik dibandingkan daerah lain

di Indonesia. Kasus baru cukup terkendali, tingkat kesembuhan di atas 90 persen yang merupakan tertinggi di Indonesia dan tingkat kematian sangat rendah,” ujarnya.

Gubernur Bali lulusan ITB Bandung ini mengatakan keberhasilan pengendalian tersebut tak lepas pelibatan seluruh sektor dan pihak berkepentingan di Bali.

“Di Bali sejauh ini masyarakatnya sangat tertib. Kita juga terapkan nilai-nilai kearifan lokal, melibatkan desa adat dalam bagian pengendalian dan penanganan COVID-19. Hal ini bahkan mendapat pujian dari Bapak Presiden karena hasilnya cukup baik,” katanya.

Mantan anggota DPR RI tiga periode pun menyinggung soal rencana ke depannya terkait penambahan rute penerbangan langsung Denpasar – Tokyo guna memudahkan lagi kunjungan warga Negeri Sakura tersebut ke Bali. **(ant)**

Denpasar Targetkan 14.152 Tenaga Kesehatan Diberi Vaksinasi COVID-19

Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali menargetkan tahap awal vaksinasi COVID-19 adalah tenaga kesehatan, baik tenaga kesehatan pemerintah maupun swasta dengan target sasaran saat ini berjumlah 14.152 orang dan diupayakan semua sasaran tersebut yang memenuhi persyaratan bisa diberi vaksinasi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dr. Luh Putu Sri Armini, M.Kes saat dikonfirmasi di Denpasar, Rabu, mengatakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Denpasar terdiri dari 11 puskesmas, RSUD Wangaya dan RSUP yang memiliki tempat penyimpanan vaksin sesuai standar WHO dengan target tahap awal tenaga kesehatan di wilayah Kota Denpasar.

Di masing-masing fasilitas kesehatan tersebut sudah ada vaksinator dengan 32 orang vaksinator. "Pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan secara bertahap, dan diharapkan ke depan semua masyarakat juga mendapatkan vaksinasi COVID-19," katanya.

Sementara itu, Menteri Dalam



Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, dalam sambutannya di Jakarta, Selasa (5/1) meminta kepala daerah untuk proaktif dalam mempersiapkan

dan mensosialisasikan program vaksinasi yang akan dilakukan secara serentak di 34 provinsi, secara bertahap, mulai pekan depan.

"Para Kepala Daerah, agar betul-betul bisa mengatur supaya jangan sampai terjadi misinformasi, harus ada sosialisasi, ada tahapan dan sosialisasi yang harus disampaikan kepada masyarakat, agar tidak terjadi kegaduhan," kata Mendagri Tito.

Mendagri Tito juga meminta, kepala daerah untuk dapat menjawab pertanyaan publik terkait prioritas vaksinasi yang dilakukan



Ilustrasi - Sarana penerapan protokol kesehatan di Pemkot Denpasar, Bali (Foto Antara News Bali/HO-Humas Pemkot Denpasar/2020)

terhadap 3 kelompok masyarakat seperti nakes dan pejabat publik serta tokoh agama. "Ini bagian dari upaya untuk meyakinkan publik bahwa vaksin aman," tandasnya.

"Penyuntikan perdana pada 13 Januari hari Rabu (13/1), itu nanti di tingkat pusat oleh Bapak Presiden Jokowi yang pertama menerima vaksin, beberapa menteri lain, pejabat tingkat pusat yang pimpinan Kementerian/

Lembaga, usia di bawah 60 tahun, karena ini yang dari Sinovac, 18-59 tahun," ujarnya.

Selain data, Mendagri Tito juga meminta kepala daerah untuk mengatur jadwal maupun kesiapan teknis lainnya dalam program vaksinasi secara gratis ini. "Harus diatur jadwalnya pada saat penyuntikan, siapa yang ditarget, kemudian koordinasi dengan aparat keamanan, TNI/Polri, Satpol PP," katanya. (ant)

Pemkot Denpasar Tindak Lanjuti Instruksi Mendagri Soal PSBB



Pemkot Denpasar tindaklanjuti instruksi Mendagri terkait PSBB (ANTARA/ I Komang Suparta/Ist/2020)

PEMERINTAH Kota Denpasar, Bali, melakukan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

"Kami melakukan rapat koordinasi terkait Instruksi Mendagri dan Surat Edaran (SE)

Gubernur Bali Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali ditindaklanjuti," kata Penjabat Sekda Kota Denpasar, I Made Toya di Denpasar, Kamis.

Rapat tersebut juga dihadiri Wakilpolresta Denpasar, AKBP I Wayan Jiartana dan OPD terkait Pemkot Denpasar bertempat di

Kantor Wali Kota Denpasar.

I Made Toya yang didampingi Jubir Satgas GTPP COVID-19 Kota Denpasar Dewa Gede Rai mengatakan pada rapat kali ini untuk menindaklanjuti Instruksi Mendagri yang akan berlaku mulai 11 sampai 25 Januari 2021.

Menurut Made Toya, memperhatikan instruksi Mendagri tersebut, sebenarnya beberapa hal dalam PSBB telah dilaksanakan Pemkot Denpasar dengan Perwali Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Seperti membatasi tempat kerja dengan menerapkan "Work From Home (WFH)", pelaksanaan belajar secara daring, pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan telah dilaksanakan di Kota Denpasar melalui Perwali Nomor 48 Tahun 2020.

"Sehingga dalam rapat ini kita kembali melakukan koordinasi dan komunikasi dalam penera-

pan di lapangan yang tentunya melibatkan satgas COVID-19 dari lingkungan desa, kecamatan hingga kota serta keterlibatan aparat keamanan dari, Kepolisian dan TNI.

"Jadi intinya kami siap menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri di antaranya membatasi di tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75 persen dan Work From Office (WFO) 25 persen yang memperlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat," ujarnya.

Begitu juga melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online, Kegiatan restoran atau kuliner (makan/minum) di tempat sebesar 25 persen dengan memperlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat dan layanan makanan melalui pesan-antar / dibawa pulang. (ant)

Tim Yustisi Awasi Pelaksanaan PPKM di Denpasar

TIM Yustisi Kota Denpasar, Provinsi Bali melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di kota setempat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar, I Dewa Gede Anom Sayoga di Denpasar, Senin, mengatakan dalam operasi ini pihaknya melibatkan tim gabungan Satpol PP, Dishub, TNI, dan Polri serta didukung kepala desa beserta staf perangkat Desa Ubung Kaja.

"Mulai hari ini sesuai dengan surat edaran pemerintah, bahwa di Denpasar sejak 11-25 Januari mendatang memberlakukan PPKM dalam upaya memutus mata rantai pandemi COVID-19," katanya.

Ia mengatakan dalam kegiatan tersebut, tim yustisi menjerang delapan orang pelanggar protokol



kehatan (prokes) karena tidak memakai masker. Sedangkan tujuh pelanggar dikenai denda dan satu orang diberikan sanksi administrasi dan

hukuman sosial

"Tim menjerang sebanyak delapan orang pelanggar. Artinya pelanggaran masih tetap ada dan perlu digencarkan sosialisasi prokes," kata Sayoga.

Dewa Sayoga mengatakan tujuh orang yang melanggar tersebut dikenai denda masing-masing sebesar Rp100 ribu. Penerapan denda ini karena melanggar Peraturan Gubernur Nomor 46 dan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Penerapan denda ini dilakukan



Tim Yustisi memberi hukuman "push up" pelanggar prokes saat pelaksanaan PPKM di Denpasar (ANTARA/ I Komang Suparta/Ist/2021)

untuk pencegahan kasus positif COVID-19 di Kota Denpasar. Penerapan sanksi ini sebagai bentuk teguran sekaligus agar mereka yang melanggar selalu mematuhi dan ingat memakai masker. Sementara itu, satu pelanggar lainnya hanya diberikan pembinaan dan sanksi berupa "push up" maupun sanksi administrasi.

Sayoga menekankan, Masyarakat yang masih kepadatan

melanggar ini memiliki berbagai alasan. Mulai dari lupa membawa masker, bosan pakai masker karena sesak, bahkan ada yang mengaku virus sudah tidak ada lagi," kata Sayoga.

Hingga saat ini pihaknya mengaku terus melakukan sidak ke beberapa tempat umum dan fasilitas umum. Dan juga menasar daerah dengan kasus penularan COVID-19 yang tinggi. (ant)

DLHK Denpasar Gencarkan Program Biopori di Musim Hujan



DLHK Denpasar lakukan pemantauan program biopori (ANTARA/ I Komang Suparta/Ist/2021)

DINAS Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar, Provinsi Bali menggenarkan program biopori di rumah tangga warga dan kantor pemerintah sebagai upaya mengatasi resapan air di musim hujan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas DLHK Kota Denpasar, Ida Bagus Putra Wirabawa di Denpasar, Ju-

mat, mengatakan program biopori tersebut dalam upaya mengatasi genangan air di musim penghujan.

"Kami sejak awal telah menggenarkan program biopori. Kali ini, guna memastikan seluruh biopori berfungsi baik sebagai resapan air, karena itu kami melakukan evaluasi dan monitoring yang menasar kantor pemerintah

dan sekolah di Kota Denpasar," katanya.

Adapun beberapa lokasi yang disasar, yakni Pusat Pelayanan Autis Kota Denpasar, Kantor DLHK Kota Denpasar serta beberapa sekolah di kawasan Lumintang Denpasar.

Putra Wirabawa menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari penerapan Perwali Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Air Hujan dan Pengolahan Sampah Organik menjadi Kompos dalam Skala Rumah Tangga, Kantor dan Sekolah.

"Kami berupaya melakukan gerakan bersama pengurangan sampah yang salah satunya dengan mengoptimalkan fungsi lubang biopori yang ada di kantor, sekolah atau rumah tangga," katanya.

Ia mengatakan bahwa kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik dapat dimasukkan ke lubang biopori yang nantinya dapat menjadi

kompos secara otomatis.

"Jadi ada dua fungsi, selain sebagai resapan air hujan juga dapat menjadi tempat komposting alami," ujarnya.

Putra Wirabawa mengatakan bahwa rata-rata biopori yang jumlahnya lebih dari 1.000 titik yang tersebar di kawasan perkantoran, ruang publik dan sekolah di Kota Denpasar ini masih berfungsi dengan baik. Pun demikian diperlukan perawatan serta pembersihan terhadap sedimentasi di saluran air. Sehingga saat hujan lebat tidak menimbulkan genangan.

"Selain monitoring dan evaluasi rutin, kami juga bekerja sama dengan pengelola untuk ikut andil melaksanakan perawatan dan pembersihan," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut dia, mengajak masyarakat untuk ikut menerapkan sistem biopori di rumah tangga. Selain itu, pola pemilahan sampah di rumah tangga atau di sumbernya juga penting dilaksanakan. (ant)

DLHK Badung Tangani Sampah Kiriman di Pantai

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung, Bali, terus memaksimalkan penanganan sampah kiriman yang dibawa arus gelombang laut ke tepi pantai yang didominasi sampah plastik yang terdampar di sepanjang Pantai Kuta, Legian dan Seminyak, Badung.

“Kami sudah mengerahkan seluruh tenaga DLHK Badung di bidang kebersihan untuk menangani sampah yang terdampar di sepanjang pantai ini,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Badung I Wayan Puja di Mangupura, Senin.

Ia mengatakan, pihaknya terus memberi atensi khusus dan selalu bahu membahu bersama masyarakat untuk membersihkan bentangan pantai di Badung dari permasalahan sampah yang terjadi akibat fenomena angin barat yang mengakibatkan banyak sampah kiriman.

“Gerakan bersih-bersih pantai terus kami lakukan, ratusan personel telah kami kerahkan serta puluhan armada juga disiapkan untuk mengangkut sampah,”

katanya.

Wayan Puja menambahkan, tidak hanya di sepanjang Pantai Kuta, Legian dan Seminyak saja, penanganan sampah juga dilakukan di kawasan pantai lainnya seperti di Pantai Jimbaran dan Kedonganan.

“Sampah kiriman ini sudah berlangsung sejak seminggu belakangan. Memang kami harus kerjakan penanganannya secara ekstra untuk menangani sampah ini,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa mengatakan, perlu ada beberapa pembenahan baik pola penanganan termasuk evaluasi kebutuhan terkait sarana prasarana penanganan sampah kiriman.

Ia mengakui, fenomena



Ilustrasi - Wisatawan berjalan melewati sampah kiriman yang memenuhi pesisir Pantai Kuta, Badung, Bali, Kamis (31/12/2020). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

sampah kiriman itu merupakan kondisi yang pasti terjadi setiap tahun, ketika angin barat sudah mulai datang, biasanya bulan Oktober hingga Maret yang akan dihadapkan pada darurat sampah.

“Rentang bulan tersebut, sampah kiriman berasal dari dalam laut yang dibawa ombak ke pesisir. Untuk itu kita perlu

penanganan ekstra, baik dari segi SOP, penyiapan SDM, sarana prasarana, dari segi waktu juga harus efektif,” ujarnya.

Ia juga sudah memerintahkan Kepala DLHK agar menyusun pola petugas yang bekerja dengan tiga shift. Petugas juga diberi batasan bentang wilayah yang ditangani sehingga ada tanggung jawab yang pasti. (adv)

Pemkab Badung Fokuskan Tiga Hal untuk Bangun Desa



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (tengah). Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, memfokuskan tiga hal utama yang akan dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam upaya akselerasi pembangunan desa di wilayah tersebut.

“Pertama adalah penuntasan pembangunan fasilitas publik, kedua peningkatan kualitas Sum-

ber Daya Manusia dan yang ketiga penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah,” ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam keterangan Humas Badung yang diterima di Mangupura, Senin.

Pihaknya ingin semua desa di Badung harus berkembang maju dan mandiri. Untuk itu akan

dilakukan pendataan dan klasifikasi, baik itu dari segi topografi maupun demografi, sehingga bisa diketahui secara mendetail karakteristik dan potensi dari masing-masing desa untuk mempercepat proses pembangunan.

Terkait dengan mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat Badung, Bupati Giri Prasta menjelaskan, Pemkab Badung akan merancang beasiswa S1 gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga diharapkan generasi muda Badung minimal mengenyam pendidikan sarjana.

“Untuk melanjutkan pembangunan Badung di masa mendatang, kami membutuhkan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, kami akan memberikan beasiswa S1 gratis untuk masyarakat yang kurang mampu, karena generasi muda yang berkualitas yang akan

kami ajak membangun Badung nantinya,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam upaya menguatkan dan menjaga ketahanan perekonomian masyarakat, pihaknya juga akan mendorong masyarakat untuk menggeluti sektor UMKM dengan memberikan penguatan modal berupa stimulus langsung dari Pemkab Badung.

“Dalam hal penguatan dan menjaga ketahanan perekonomian masyarakat, kami akan memberikan dana stimulus untuk mendorong masyarakat menggerakkan sektor UMKM,” ungkap Bupati Giri Prasta.

Pihaknya juga terus berupaya menyerap aspirasi masyarakat desa yang akan digunakan sebagai masukan dalam pembangunan seperti yang telah dilakukan di Desa Adat Darmasaba, Badung beberapa waktu yang lalu. (adv)

Badung Perluas Akses Pasar Kopi Lokal

DINAS Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, Bali, mengawali tahun 2021 dengan meluncurkan "Display Kopi" sebagai upaya untuk memperluas akses pasar berbagai produk kopi lokal.

"Display Kopi ini kami luncurkan dalam upaya untuk menggairahkan petani kopi khususnya dalam rangka untuk memperluas akses pasar dan memperkenalkan aneka produk kopi yang sudah banyak dikembangkan oleh petani kopi di wilayah Badung Utara," ujar Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Badung I Wayan Wijana di Mangupura, Selasa.

Melalui "Display Kopi" yang dibangun tersebut, pihaknya akan membantu mempromosikan aneka jenis produksi kopi dan komoditas pertanian lainnya serta sebagai media edukasi bagi masyarakat khususnya bagi generasi muda yang ingin menekuni profesi sebagai ba-

rista atau peracik kopi.

"Display Kopi yang kami miliki ini juga dilengkapi dengan alat-alat untuk meracik kopi yang modern dan juga sudah tersedia instruktur yang memiliki sertifikat," katanya.

Wayan Wijana menjelaskan, sebelumnya pihaknya juga telah menyelenggarakan pelatihan bagi puluhan generasi muda untuk menjadi barista yang andal dan profesional sekaligus sebagai upaya dalam rangka menggairahkan sektor pariwisata di Badung yang terdampak pandemi COVID-19.

Peserta pelatihan itu nantinya diharapkan dapat mengembangkan diri menjadi tenaga barista yang siap kerja atau menjadi wirausaha muda yang dapat menyerap tenaga kerja dan membeli produksi kopi yang dihasilkan para petani kopi setempat.

Selain itu, menurutnya akses pasar terhadap produk kopi



Display kopi di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Badung. Antara/HO-Humas Badung/fik

dari wilayah Badung utara perlu dimaksimalkan karena selain mengandalkan sektor pariwisata, Badung juga memiliki potensi yang besar di sektor perkebunan khususnya kopi.

"Selain memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor

pariwisata, kami juga memiliki potensi yang besar di sektor perkebunan khususnya kopi yang dihasilkan petani di wilayah Badung utara. Itu akan terus kami dorong dan kembangkan," ungkap Wayan Wijana. (adv)

Pemkab Badung Sosialisasikan E-Surat Bagi OPD



Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa (Kanan). Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, menyosialisasikan Aplikasi E-Surat kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Badung sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik.

"E-Surat ini merupakan aplikasi pengelolaan surat menyurat secara digital/elektronik yang bisa berjalan pada platform IOS maupun Android, untuk mempercepat penyampaian informasi surat dan disposisi kepada pihak yang dituju," ujar Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangu-

pura, Selasa.

E-Surat merupakan kerja sama antara perangkat daerah dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai pembangun sistem, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskerpus) mengarahkan sistem sesuai dengan aturan Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) dan Bagian Organisasi yang menitikberatkan pada ketatanaskahan.

"Saat ini Dinas Kominfo berusaha membangun sistem aplikasi E-Surat, yang diharapkan bisa diaplikasikan pada Februari 2021 dalam melakukan pengiriman dan penerimaan surat yang memberikan informasi tentang proses alur surat sehingga dapat meningkatkan efisiensi di segala aspek termasuk efisiensi tenaga, biaya, dan penghematan kertas," ungkapnya.

Dengan diterapkannya E-Surat di Badung, Sekda Adi Arnawa mengharapkan ada efisiensi waktu dan penggunaan kertas karena semua admin-

istrasi sudah berbasis digital, dari konsep surat kemudian alur yang melewati jenjang struktural sebagai penanggung jawab sekaligus korektor atau persetujuan sampai surat tersebut ditandatangani secara elektronik oleh pimpinan.

"Selain itu, aplikasi E-Surat ini akan menjadikan OPD bekerja lebih cepat dan mudah terutama dalam hal administrasi perkantoran, dimana pemerintah dituntut untuk terus mengikuti perkembangan teknologi di bidang informasi," katanya.

Ia menjelaskan aplikasi E-Surat dapat diakses dengan mudah secara mobile melalui ponsel pintar maupun tablet pc yang terkoneksi dengan jaringan internet. Pengembangan aplikasi E-Surat tersebut meliputi pengiriman atau surat keluar dan penerimaan atau surat masuk secara elektronik melalui jaringan internet baik intern maupun antar OPD secara cepat, tepat dan akurat. (adv)

Bupati Badung Giri Prasta Minta Pengurus MDA Optimal Lestarikan Adat

BUPATI Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta, meminta pengurus atau prajuru Majelis Desa Adat (MDA) kecamatan sekabupaten itu, masa bakti 2021-2026, yang baru dikukuhkan, bekerja secara optimal dalam upaya pelestarian adat.

"Selamat kepada pengurus MDA kecamatan yang terpilih. Saya minta kepada pengurus terpilih untuk bekerja maksimal dalam upaya pelestarian adat di wilayah masing-masing," ujar dia dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Badung, Sabtu.

Pihaknya juga meminta para pengurus MDA selalu berpegang teguh pada adat dan hukum positif yang berlaku.

"Karena hukum adat pasti akan kalah jika berhadapan dengan hukum positif dan Perda Desa Adat yang berlaku saat ini hanya berfungsi untuk mengayomi keberadaan desa adat," katanya.

Pemkab Badung terus berkomitmen menjadi garda

terdepan dalam pelestarian adat di 120 desa adat di daerah itu.

Untuk menguatkan sektor perekonomian desa adat, ia juga meminta kepada kepala desa atau bendesa adat agar secara rutin melakukan audit di LPD masing-masing. Hal itu, untuk menjaga kesehatan finansialnya karena nantinya pihaknya memberikan dana penguatan LPD di Badung.

Ia menjelaskan bahwa LPD soko guru ekonomi desa adat.

Selain itu, kata dia, seluruh bendesa adat diminta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik terkait dengan pemahaman dan penguatan adat, dengan berpedoman pada dresta di wilayah masing-masing.

"Pemkab juga akan mempersiapkan dana abadi untuk membantu pelaksanaan upacara dewa yadnya yang digelar oleh masyarakat," ungkap Bupati Giri Prasta.

Ketua MDA Badung A.A. Putu



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

Sutarja menjelaskan pengukuhan tersebut berdasarkan Pasal 43 Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat yang menjelaskan di setiap desa adat harus memiliki Lembaga Desa Adat yang di antaranya bernama Paiketan Krama Istri Desa Adat, Pecalang, Yowana Desa Adat, hingga Paiketan Pemangku, Paiketan Serati, Paiketan

Werddha dan Pasraman.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada Bupati Giri Prasta karena sudah memberikan bantuan fasilitas maupun kebijakan strategis sehingga pelaksanaan acara Pengukuhan Pengurus MDA Kecamatan se-Kabupaten Badung masa bakti 2021-2026 bisa berjalan lancar," ujarnya. (adv)

Satpol PP Badung Siap Tindak Tempat Usaha Langgar PPKM



Petugas Satpol PP Badung mendata pekerja lokasi usaha yang melewati batas aturan jam operasional untuk diberikan surat peringatan saat sidak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di kawasan Canggu, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (11/1/2021) malam. (FOTO ANTARA/Naufal Fikri Yusuf)

SATPOL PP Kabupaten Badung, Provinsi Bali siap menindak sejumlah tempat usaha yang melanggar aturan jam operasional saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Pada hari pertama PPKM pada Senin (11/1) kami telah melakukan tindakan yaitu lang-

sung menutup operasional tempat usaha yang buka lebih dari jam operasional dan meminta pengunjungnya membubarkan diri serta langsung memberikan surat panggilan bagi pengelola tempat usaha untuk datang ke kantor," kata Kepala Satpol PP Badung, I Gusti Agung Ketut Suryanegara di Mangupura, Ibu

Kota Kabupaten Badung, Selasa.

Dalam PPKM, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2021 yang membatasi jam operasional untuk seluruh kegiatan usaha hingga pukul 21.00 WITA.

Untuk mengawal aturan tersebut, pihaknya melakukan patroli bersama jajaran terkait seperti TNI, Polri dan Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan dan memastikan pelaku kegiatan usaha mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

"Kami mengawal penerapan Surat Edaran Bupati Badung yang sudah jelas mengatur pukul 21.00 WITA operasional semua usaha sudah harus tutup. Beberapa tempat usaha yang kami temukan kemarin masih beroperasi, sempat berupaya tawar menawar. Namun kami tidak ada toleransi, sudah jelas jam 21.00 WITA harus tutup ya... tutup," katanya.

Ia menjelaskan contoh tawar menawar dari sejumlah pelaku usaha tersebut yaitu tidak melayani

transaksi pemesanan makanan dan minuman lagi namun meminta masih dapat melayani tamu yang sedang menikmati makanan dan minumannya.

Pada hal sesuai aturan yang ada, para pekerja tempat usaha seperti restoran dan kafe harus dapat memperkirakan dan melayani pemesanan terakhir pengunjung sebelum batas waktu operasional dan tepat pada pukul 21.00 WITA tempat usaha tersebut dapat ditutup operasionalnya.

"Kalau nunggu orang selesai makan bisa sampai dini hari. Kan sama saja masih operasi mereka. Seharusnya satu jam sebelumnya sudah 'last order' dan disampaikan kepada tamu jam 21.00 sudah tutup kan bisa," katanya.

Ia menambahkan, sanksi pertama yang diterapkan bagi pelaku usaha yang melanggar penerapan PPKM itu adalah dengan mendata penanggung jawab tempat usaha, menyita identitasnya dan meminta mereka datang ke Kantor Satpol PP Badung. (adv)

Pemkab Badung Akan Beri Bantuan Tunai untuk Warga saat PPKM

PEMKAB Badung akan memberikan bantuan dana tunai sebesar Rp300 ribu per KK kepada warga Badung yang belum pernah mendapatkan bantuan dalam bentuk apapun dari pemerintah terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Setelah berkoordinasi dengan dengan pihak Kejari terkait dengan legal opinion, kami pemerintah bersama DPRD Badung sepakat untuk memberikan bantuan sebesar Rp300 ribu per KK selama pelaksanaan PPKM kepada masyarakat yang memang sama sekali belum pernah mendapatkan bantuan," ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Kamis.

Proses pembagian bantuan stimulus dana tunai itu akan dilakukan secara simbolis pada Jumat (15/1) besok di Wantilan Objek Wisata Desa Sangeh, Badung.

Selanjutnya, untuk proses pencairan bantuan dana tunai, Bupati Giri Prasta mengatakan, pihaknya telah memerintahkan Kelian Dinas, Kepala Lingkungan, Kepala Desa, Lurah dan Camat di masing-masing wilayah agar berkoordinasi dengan pihak Bank BPD Bali dalam membantu masyarakat penerima bantuan membuat rekening bank dengan sistem jemput bola ke rumah.

"Bantuan akan kami teruskan melalui rekening Bank BPD Bali. Untuk itu kami minta kepada Kelian Dinas, Kaling, Lurah, Perbekel dan Camat untuk berkoordinasi dengan pihak BPD Bali agar membantu masyarakat dalam membuat rekening bank dengan sistem jemput bola untuk menghindari kerumunan pelayanan di bank," katanya.

Untuk mensukseskan program bantuan ini, ia meminta pihak desa dan kelurahan baik itu kelian dinas, kepala lingkungan serta



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (kiri) dan Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa (kanan). ANTARA/HO-Humas Badung/fik

pihak kecamatan agar melakukan pendataan kepada masyarakat secara teliti dan baik. Sehingga bantuan menjadi tepat sasaran dan tidak tumpang tindih agar masyarakat yang selama ini sama sekali belum pernah tersentuh bantuan dapat memperoleh program bantuan itu.

"Ini penting validasi dan pendataan segala bidang yang dilakukan di masing-masing desa karena data ini nantinya tidak hanya berguna dalam hal penyaluran bantuan semata namun juga akan sangat berguna untuk ke depannya," ungkap Bupati Giri Prasta. (adv)

Pemkab Badung Realisasikan BST selama PPKM



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan bantuan BST kepada masyarakat di Wantilan Objek Wisata Sangeh, Jumat (15/1/2021). ANTARA/Humas Badung/fik

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, merealisasikan pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk membantu meringankan beban masyarakat Badung selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah tersebut.

"Kami bersyukur di masa sulit seperti saat ini masih bisa

membantu meringankan beban masyarakat Badung dengan menyalurkan bantuan sosial tunai sebesar Rp300 ribu per KK kepada warga penerima manfaat," ucap Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat penyerahan BST secara simbolis di Wantilan Objek Wisata Sangeh, Badung, Jumat.

Untuk program BST terse-

but, pihaknya telah menyiapkan anggaran bantuan sosial tunai sebesar Rp29 miliar yang diambil dari pos dana tidak terduga di Pemkab Badung.

Pihaknya juga telah bersinergi dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Badung untuk menerbitkan legal opinion sehingga bisa menyalurkan bantuan sebesar itu kepada warga penerima manfaat sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kami melalui Dinas Sosial berupaya membantu meringankan beban masyarakat selama penerapan PPKM dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari," katanya.

Bupati Giri Prasta menjelaskan, pihaknya meminta semua pihak terkait mulai dari Kelian Dinas, Kepala Lingkungan, Kepala Desa dan Lurah serta Camat untuk bisa menuntaskan pendataan di masing-masing wilayah dalam dua hari kedepan.

"Untuk saat ini sudah ada sekitar 60 ribu warga badung yang terdata secara valid sebagai penerima bantuan sosial tunai. Dan kami juga meminta kepada semua Camat untuk membantu dan mengawasi Kelian Dinas, Kaling, Perbekel dan Lurah dalam melaksanakan pendataan, sehingga jangan sampai ada data yang tercecer maupun tumpang tindih," ungkapnya.

Nantinya, dana bantuan sosial tunai itu disalurkan melalui rekening Bank BPD Bali dengan sistem jemput bola untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan masyarakat di bank.

Dalam kegiatan penyerahan BST di Wantilan Objek Wisata Sangeh tersebut, Pemkab Badung menyerahkan bantuan kepada 100 KK perwakilan penerima manfaat yang berasal dari Desa Selat sebanyak 40 KK, Desa Sangeh 40 KK, Desa Blahkiuh 15 KK dan Desa Bongkasa 5 KK. (adv)

Gianyar Siapkan 16 Lokasi Penyimpanan Vaksin COVID-19

DINAS Kesehatan bersama TGPP (Tim gugus tugas percepatan penanganan) COVID-19 Kabupaten Gianyar, Bali, telah menyiapkan 16 lokasi sebagai tempat penyimpanan vaksin agar pelaksanaan vaksinasi serentak secara nasional dapat berjalan baik.

“Pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga kesehatan Gianyar akan dilakukan di 16 titik tersebut yakni di 13 puskesmas, dua RS pemerintah, dan satu RS swasta. Simulasi persiapan pelaksanaan vaksin COVID-19 telah dilakukan di RSUD Sanjiwani, mulai Selasa,” kata Sekdakab Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya usai memimpin rapat TGPP COVID-19 melalui siaran pers Diskominfo Gianyar, Selasa.

Dari simulasi diperkirakan dalam seminggu jumlah tenaga kesehatan yang divaksin sebanyak 555 orang. Bagi yang sudah

menerima vaksin, akan divaksin tahap II setelah 14 hari, tambah Sekda Wisnu Wijaya.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan vaksinasi untuk tenaga kesehatan di Gianyar akan dilakukan secara serentak mengikuti jadwal nasional, yakni vaksinasi tahap I dilakukan mulai Januari-April 2021.

Pendistribusian vaksin Covid-19 dari provinsi akan dilakukan hari ini. Penjemputan vaksin dilakukan Dinas Kesehatan dengan pengawalan dari pihak kepolisian dan TNI. Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, jumlah vaksin untuk Kabupaten Gianyar pada tahap I ini sebanyak 4.210.

Menyikapi pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan penurunan, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (TGPP) COVID-19 Kabupaten Gianyar menggelar rapat evaluasi terkait



Rapat Tim gugus tugas percepatan penanganan (TGPP) Covid-19 kabupaten Gianyar (Foto Humas Gianyar)

upaya penanganan COVID-19 di Kabupaten Gianyar selama ini.

Rapat digelar di kantor Bupati Gianyar dihadiri Kapolres Gianyar AKBP I Dewa Made Adnyana, Dandim 1616/Gianyar Letkol Inf Frandi Siboro, dan unsur Yonzipur 18/YKR.

Sekda Wisnu Wijaya mengatakan tujuan dari rapat koor-

dinasi ini adalah mengevaluasi penanganan COVID-19 terkait masih merebaknya kasus COVID-19 di Gianyar. Rapat ini juga bertujuan mengefektifkan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta sebagai antisipasi pelaksanaan Hari Siwaratri malam ini. **(ant)**

Kabupaten Gianyar Miliki Kamera Pengendali Lalu Lintas



Ruang Pusat Kendali Area Traffic Control System (ATCS) beserta di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar. (AntaraNews Bali/HO-Humas Pemkab Bangli/2021)

UNTUK memantau dan mengendalikan lalu lintas pada tiap persimpangan, Kabupaten Gianyar, Bali, saat ini memiliki Ruang Pusat Kendali Area Traffic Control System (ATCS) beserta perangkatnya yang dipusatkan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar.

“Dengan bantuan kamera yang

ditempatkan di persimpangan, maka aktivitas persimpangan dapat dipantau bahkan dikendalikan dari jarak jauh seperti mengatur siklus waktu traffic light dari ruangan pantau dan kendali atau control room,” ujar Wakil Bupati Gianyar AA. Gde Mayun didampingi Kepala Dishub Kabupaten Gianyar, I Wayan Suamba, saat me-

nerima kunjungan Kasi Prasarana BPTD XII Propinsi Bali Boy Nurdin di Kantor Dishub Gianyar, Senin.

Media ini juga dilengkapi dengan fasilitas RSPA (Road Safety Public Announcer) untuk sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas, tertib di jalan, penggunaan helm dan lainnya serta dapat juga untuk sosialisasi dan publikasi terkait protokol kesehatan, demikian siaran pers Diskominfo Gianyar.

Selain itu, ada penambahan pemasangan kamera CCTV yang lebih canggih dengan jaringan menggunakan media fiber optic pada 5 (lima) persimpangan. Adapun persimpangan tersebut yakni, persimpangan alun-alun Gianyar, persimpangan BPD, persimpangan RS Sanjiwani, persimpangan Bitera dan Persimpangan Buruan. Ruang Pusat Kendali beserta perangkatnya ini merupakan bantuan dari Kementerian Perhubungan cq Balai Pengelola Transportasi Darat

(BPTD) Wilayah Propinsi Bali dan NTB tahun 2020.

Dalam kesempatan itu, Kasi Prasarana BPTD XII Propinsi Bali, Boy Nurdin, dalam kesempatan itu melakukan pengecekan ke ruang pusat kendali dan melihat cara kerja staf untuk mengoperasikan.

“ATCS adalah sebuah sistem yang dipergunakan untuk mengendalikan lalu lintas di persimpangan dan mengatur rangkaian persimpangan di dalam suatu kawasan terbatas. Semoga dengan bantuan ini, aktivitas berlalu lintas setiap persimpangan bisa dipantau tiap hari,” kata Boy Nurdin.

Sementara Kadishub Wayan Suamba menambahkan ATCS di Kabupaten Gianyar telah ada sejak 2014 yang meliputi tiga persimpangan, yaitu persimpangan Semebaung, persimpangan Kemenuh, Persimpangan Cemenggaon. Pada 2015 bertambah satu persimpangan yakni simpang masjid. **(ant)**

Tabanan Siap Laksanakan PPKM

Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila menyatakan pihaknya telah siap melaksanakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Kabupaten Tabanan, Bali, mulai 11 Januari 2021 sampai 25 Januari 2021.

“Sampai saat ini, kondisi di Tabanan dalam masa pandemi ini masih masuk zona merah karena penyebarannya tidak terkendali,” katanya saat memimpin Apel Siaga terkait penerapan PPKM di Tabanan, Senin.

Ia menyampaikan Pemda Tabanan, termasuk ditetapkan Pemprov Bali sebagai daerah PPKM, selain Badung dan Denpasar.

“Kita sebagai daerah penyangga Badung-Denpasar dan juga zona merah diharuskan menerapkan PPKM tersebut,” ujarnya.

Daerah yang menerapkan PPKM di Provinsi Bali, yakni Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, serta daerah penyangga daerah tersebut, termasuk Tabanan.

Hal itu merujuk Inmendagri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, dan Pergub Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam tatanan kehidupan era baru.

Juga, Perbup Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan penegakan hukum Proses sebagai Upaya Pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam tatanan kehidupan era baru.

Menurut Sekda I Gede Susila, dengan ditetapkannya PPKM ini memberikan suatu langkah-langkah yang terukur dalam rangka menegakkan disiplin penanganan COVID-19. “Sebelumnya kita hanya memberikan imbauan dan sosialisasi, namun mulai hari ini (11-01-2021), tindakan kita harus lebih tegas dan terukur,” katanya.



Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila saat memimpin Apel Siaga terkait penerapan PPKM di Tabanan, Senin (11/1/2021). (FOTO Antara News Bali/Pande Yudha/2021)

Kedepannya, setiap kegiatan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan maka akan ditindak tegas dan berujung ke tindakan hukum. “Dengan demikian, bahwa masyarakat kita menyadari akan pentingnya disiplin dalam pengendalian COVID-19,” katanya.

Pihak Pemkab Tabanan juga akan terus melakukan berbagai

upaya untuk meminimalkan penyebaran virus ini sesuai dengan Inmendagri, Pergub dan Perbup. Pihaknya juga mengaku telah menyampaikan hal tersebut di lingkungan masyarakat melalui Bendesa Adat, Majelis Alit, Camat, untuk selalu melakukan sosialisasi dan pemantauan di masyarakat. **(ant)**

Bupati Bangli Resmikan SD Dua Bahasa "Bali Bilingual School"



Bupati Bangli I Made Gianyar menandatangani prasasti saat peresmian sekolah dasar Bali "Bilingual School" atau dua bahasa di Kabupaten Bangli. (Foto Humas Bangli)

BUPATI Bangli I Made Gianyar didampingi Kadisdikpora Kabupaten Bangli Drs. I Nengah Sukarta, menandatangani prasasti saat peresmian sekolah dasar dua bahasa "Bali Bilingual School" (BBS) di Kabupaten Bangli.

“Pendidikan adalah cahaya kehidupan, bahwa dengan pengetahuan, hidup orang

itu bisa lebih maju, bisa lebih bahagia, sehingga negara pun telah menegaskan di dalam UUD 1945, bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kewajiban kita bersama, kewajiban pemerintah dan kewajiban warga negara juga,” kata Bupati Bangli I Made Gianyar, saat peresmian sekolah swasta itu di Bangli, Senin.

Diskominfo Bangli dalam siaran pers yang diterima ANTARA menyebutkan SD Bali Bilingual School itu adalah salah satu sekolah swasta di Bangli yang didirikan pada tahun 2019 di bawah naungan Yayasan Satria Mahottama.

“Sehingga tidak semua urusan pendidikan bisa diselesaikan oleh pemerintah. Maka dari itu sektor swasta pun diberi ruang oleh negara untuk bersama-sama memajukan dunia pendidikan di kabupaten Bangli,” tambah Bupati.

Dalam kesempatan itu, Bupati Bangli menyatakan terima kasih atas nama masyarakat Bangli, utamanya atas nama orang tua yang menginginkan anaknya menerima pendidikan yang lebih maju, mengucapkan terima kasih kepada manajemen BBS (Bali Bilingual School) karena telah berjalan bersama-sama pemerintah berjuang untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Bangli.

Pendiri lembaga Bali Bilingual School I Dewa Ayu Supartini mengatakan memiliki harapan besar terhadap peningkatan kualitas Pendidikan di Kabupaten Bangli.

“Saat ini, SD Bali Bilingual School sudah memasuki tahun ke-2 dengan jumlah siswa kelas 1 sebanyak 21 siswa, kelas 2 sebanyak 31 siswa, dan kelas 3 sebanyak 8 siswa. Adapun jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sebanyak 9 orang. SD Bali Bilingual School menggunakan Kurikulum Nasional Plus dengan Kurikulum K13 sebagai kurikulum utama dan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran tambahan,” ujar Ayu Supartini.

Keberadaan SD Bali Bilingual School tidak terlepas dari dukungan pihak pemerintah dan antusias masyarakat Bangli, sehingga sampai saat ini Bali Bilingual School terus berkembang untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Bangli. **(ant)**

Pemkab Klungkung Rancang E-Arsip



Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara virtual melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Bupati Klungkung (7/1/2021). (FOTO Antara News Bali/HO-Humas Klungkung/2021)

BUPATI Klungkung, Bali, I Nyoman Suwirta, menyatakan pemkab yang dipimpinnya akan merancang E-Arsip sebagai implementasi kearsipan modern dan handal dari manual ke digital guna menindaklanjuti Laporan Kementerian PANRB Nomor B/423/RB 06/2019 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Tahun 2019. "Jangan biarkan kantor kita dipenuhi dengan kertas, bersihkan arsip kita dengan rapi. Arsip merupakan hal yang sangat penting yang harus ditata dengan sebaik-baiknya, karena itu masing-masing OPD harus bisa menata arsip secara mandiri dengan pengelolaan

ruangan dengan baik," katanya dalam keterangan yang diterima dari Humas Pemkab Klungkung, Sabtu.

Untuk percepatan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan itu, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara virtual yang dibuka Bupati Suwirta melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Bupati Klungkung (7/1).

"Penataan arsip harus mulai dari penataan setempat dengan pengelolaan ruang disetiap sudut harus diperhatikan. Dengan pengelolaan arsip sesuai dengan aturan dan digitalisasi arsip, maka sasaran birokrasi yang kapabel dapat terwujud," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung, I Komang Gde Wisnuadi, mengatakan bimtek kearsipan bertujuan

membangun kapasitas dan mengupayakan peningkatan kualitas tata kelola kearsipan di lingkungan Pemkab Klungkung serta mempercepat manajemen kearsipan modern dan handal melalui sistem kearsipan dinamis.

"Setelah sosialisasi bimtek kearsipan akan diadakan monitoring dan evaluasi kearsipan di masing-masing OPD," katanya di sela-sela bimtek yang diikuti 39 peserta dari masing-masing OPD dengan materi pengelolaan arsip dinamis, teknis implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan pengawasan kearsipan Internal.

Sementara itu, Wakil Bupati Klungkung, I Made Kasta, mewakili Bupati Klungkung, menghadiri Pejaya-jaya Penetapan Miwah Penguatan Prajuru Majelis Desa Adat Kecamatan Se-MDA Kabupaten Klungkung Masa Bakti 2021-2026 di Wanti Wanti Pura Agung Kentel Gumi, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung (8/1). (ant)

2021, Bupati Klungkung Targetkan Angka Kemiskinan 3 Persen

BUPATI Klungkung, I Nyoman Suwirta, menargetkan Angka Kemiskinan 3 persen pada tahun 2021 yang berarti menurun dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 4,87 persen atau masih di atas persentase penduduk miskin Provinsi Bali sebesar 3,78 persen pada tahun itu (2020).

"Perkembangan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 yaitu 9,66 ribu jiwa dan di tahun 2020 menurun menjadi 8,76 ribu jiwa," katanya dalam keterangan pers yang diterima dari Humas Pemkab Klungkung, Sabtu.

Saat membuka rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Klungkung dengan didampingi Wakil Bupati Klungkung, I Made Kasta, selaku ketua TKPKD (30/12/2020), ia menjelaskan penduduk miskin di Kabupaten Klungkung secara

persentase pada tahun 2019 adalah 5,40 persen. Pada tahun 2020 menurun menjadi 4,87 persen atau masih di atas persentase penduduk miskin Provinsi Bali sebesar 3,78 persen pada tahun 2020.

"Namun, Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 adalah 0,62 persen dan pada tahun 2020 naik menjadi 0,67 persen, sedangkan indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2019 adalah 0,13 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,17 persen atau masih di atas Provinsi Bali pada tahun 2020 adalah 0,10 persen," katanya.

Dalam rapat yang juga dihadiri Kepala Baperlitbang Kabupaten Klungkung, Wayan Wasta, dan Kepala Badan Pusat Statistik Klungkung Ir. A.A. Ayu Raka Swarningsih, Bupati Suwirta mengatakan data kemiskinan harus akurat dan penanganan kemiskinan harus satu pintu mulai dari "pintu masuk" dinas sosial.



Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, saat memimpin rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Klungkung dengan didampingi Wakil Bupati Klungkung, I Made Kasta, selaku ketua TKPKD di Klungkung, Rabu (30/12/2020). (FOTO Antara News Bali/HO-Humas Klungkung/2020)

"Pemilahan kemiskinan menjadi dua yakni kemiskinan permanen dan tidak permanen. Kemiskinan permanen harus ditangani semua, yang tidak permanen kita pilah dan kita didik sesuai dengan program yang sudah tersusun. Target 3 persen harus kita capai untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Klungkung," ujarnya.

Kepada Tim Koordinasi Pen-

anggulangan Kemiskinan Daerah, Bupati Suwirta berharap untuk berperan aktif melaksanakan program kegiatan sesuai bidang tugas masing-masing, serta mengoordinasikan tersusunnya strategi penanggulangan kemiskinan daerah. "Keluar dari zona nyaman untuk tangani kemiskinan. Tahun 2021, kita fokus tuntaskan kemiskinan," katanya. (ant)

Jembrana Siapkan Hotel Isolasi Pasien COVID-19



Rapat Satgas Covid-19 Jembrana, salah satunya membahas rencana isolasi pasien di hotel setelah daya tampung ruang isolasi RSUD Negara dan Puskesmas penuh, Kamis (7/1). (AntaraneWS Bali/Gembong Ismadi/2021)

PEMERINTAH Kabupaten Jembrana, Bali menyiapkan hotel sebagai tempat isolasi pasien Covid-19, setelah dalam beberapa hari terakhir jumlah warga yang tertular virus tersebut melonjak tajam.

"RSU Negara sudah kewalahan untuk menampung pasien Covid-19, kami menyiapkan hotel sebagai tempat isolasi,"

kata Penjabat Sekda Jembrana I Nengah Ledang usai rapat Satgas Covid-19, di Negara, Kamis.

Ia mengatakan, salah satu hotel yang disiapkan adalah Hotel Jimbarwana yang merupakan milik Pemkab Jembrana, yang apabila tidak mampu menampung, akan disiapkan hotel lainnya.

Menurutnya, lonjakan penderita Covid-19 dalam beberapa hari terakhir karena masyarakat mulai abai terhadap protokol kesehatan.

Untuk itu, dalam rapat Satgas Covid-19 Jembrana ditegaskan, akan melakukan pengawasan, penindakan hingga pemberian rekomendasi hukum.

"Kita bersama-sama harus mencegah penularan Covid-19. Pada tanggal 6 Januari lalu, ditemukan 55 orang penderita baru di Jembrana. Itu merupakan jumlah tertinggi dalam satu hari," katanya.

Bagi pelanggar protokol kesehatan akan mendapatkan tindakan tegas, tidak seperti sebelumnya, dimana petugas masih melakukan pendekatan persuasif.

Komandan Kodim 1617 Jembrana Letnan Kolonel Infanteri Hasrifudin Haruna yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan, menyikapi PSBB di Jawa dan Bali, perlu diambil langkah preventif, karena Jembrana merupakan jalur utama

di Provinsi Bali.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Jembrana dr I Gusti Agung Putu Arisantha mengatakan, pada tanggal 23 Desember Jembrana masuk zona kuning, yang kemudian berubah menjadi zona merah pada tanggal 1 sampai 6 Januari.

Ia mengatakan, tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Kabupaten Jembrana mencapai 85 persen, dengan kematian mencapai 2,9 persen.

"Hingga hari ini jumlah kumulatif pasien Covid-19 sebanyak 968 orang, dengan 823 orang sembuh dan 29 orang meninggal dunia," katanya.

Ia juga mengungkapkan, saat ini ada 42 orang pasien yang belum mendapatkan tempat isolasi di RSUD Negara maupun Puskesmas karena penuh.

Untuk kluster penularan menurutnya berasal dari pelaku perjalanan, keluarga dan kegiatan keagamaan, selain karena kesadaran menerapkan protokol kesehatan yang kurang saat warga keluar rumah. (ant)

Wakil Bupati Jembrana Siap Divaksin

UNTUK memastikan jika vaksin COVID-19 aman, Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan siap untuk divaksin pertama kali.

"Saya siap jadi yang pertama divaksin untuk menepis pihak yang meragukan keamanan vaksin COVID-19," katanya di Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, Senin.

Ia mengatakan, bersama Bupati I Putu Artha yakin jika vaksin tersebut aman, dan siap menjadi contoh masyarakat.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir, karena vaksinasi tahap pertama juga akan dilakukan pejabat pemerintah mulai dari pusat hingga daerah.

Terkait keamanan vaksin, ia minta masyarakat untuk percaya dengan pemerintah, karena vaksin tersebut sudah melewati berbagai tahapan

sebelum diberikan kepada manusia.

"Jangan terpengaruh isu yang tidak jelas. Tujuan vaksin ini baik, yaitu untuk melindungi rakyat dari penularan COVID-19," katanya.

Untuk vaksinasi di Kabupaten Jembrana, Juru Bicara Satgas COVID-19 dr I Gusti Agung Putu Arisantha mengatakan, untuk tahap ini sebanyak 1.570 penerima akan disuntik vaksin tersebut.

Dengan pertimbangan terlibat langsung penanganan pasien COVID-19, ia mengatakan, tenaga medis akan mendapatkan prioritas.

"Pada tahap kedua akan dilakukan vaksin terhadap 1010 orang. Saat ini kami masih menunggu kiriman vaksin dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali," katanya. (ant)



Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mengaku siap menjadi orang yang pertama menerima vaksin Covid-19, untuk membuktikan vaksin tersebut aman, Senin (11/1). (AntaraneWS Bali/Humas Jembrana/2021)

2021, Pasar Banyuasri di Singaraja Dirancang Jadi Pasar Pariwisata

BUPATI Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan Pasar Banyuasri di Singaraja yang rencananya diresmikan awal tahun 2021 akan dirancang menjadi pasar untuk pariwisata atau tourism market.

"Ketika Pasar Banyuasri bisa menjadi tourism market berarti kita akan menampung semaksimal mungkin dagangan tradisional yang sudah memiliki tempat, tentu dengan kualitas yang baik," kata Bupati Putu Agus Suradnyana di Singaraja, Rabu.

Menurut Bupati, pasar itu nantinya akan dijaga tingkat kebersihannya dengan sistem yang baik. "Di pasar itu juga ada food branded seperti kopi dan itu semua dipetakan atau dizonasi menggunakan peta dengan baik. Bisa ditentukan nomor satu, ada apa, dan seterusnya," kata Bupati Suradnyana.

Untuk mempersiapkan pasar sebagai destinasi wisata baru, lanjut Bupati, akan dilakukan zonasi yang dapat disimulasikan

dengan baik dan dapat dihitung kapasitas orang yang datang, misalnya dihitung dengan baik kecenderungan orang yang datang dan kecenderungan jam berapa pasar buka serta jam berapa lowongnya.

"Jika nantinya parkir lowong dan dapat digunakan, di hari Minggu bisa diisi dengan kegiatan seperti lomba anak-anak melukis atau jual beli mobil, tentunya ini baik, sehingga dapat dijadikan menjadi daerah tujuan wisata baru," ucap Bupati Suradnyana.

Besar harapan Bupati Suradnyana, Pasar Banyuasri ini secara branding bukan saja sebagai pasar tradisional, misalnya di pasar itu anak-anak muda di Buleleng diberikan ruang untuk bermain musik atau mengamen dengan konsep dan pola yang berbeda.

"Dengan dukungan speaker yang bagus, mic yang bagus dan gitar yang benar-benar bagus, sehingga dapat menarik perhatian masyarakat, apalagi



Suasana Pasar Banyuasri di Singaraja yang rencananya diresmikan awal tahun 2021 menjadi pasar untuk pariwisata atau "tourism market". (FOTO Antara News Bali/Made Adnyana/2020)

Buleleng memiliki talenta musik banyak sekali. Ini kita lakukan agar Pasar Banyuasri di Buleleng berbeda dengan pasar-pasar tradisional lainnya yang ada di Bali," katanya.

Dengan begitu, lanjut dia, ke depan Pasar Banyuasri akan ramai dengan beragam atraksi.

Mereka yang bisa sulap akan diberi ruang sehingga pasarnya kelihatan aktif.

"Begitu yang saya lihat pasar-pasar di luar negeri yang dikonsep menarik, seperti food truck bakery, kita akan buat suasana pasar yang orang selalu cari," katanya. **(ant)**

2021, Karangasem Anggarkan Rp 61,177 Miliar Untuk Pendidikan



Bupati Karangasem Mas Sumatri saat membuka rembuk pendidikan tahun 2021 di Aula Sabha Widya Praja Disdikpora Kabupaten Karangasem, Kamis (14/1/2021). (Antara News Bali/HO-Humas Pemkab Karangasem/2021)

PEMERINTAH Kabupaten Karangasem, Bali, menganggarkan Rp61,177 miliar untuk sektor pendidikan tahun 2021 sebagai salah satu faktor yang menentukan kualitas manusia di kabupaten setempat, selain sektor kesehatan dan ekonomi.

"Secara berkelanjutan, Pemkab Karangasem memberikan perhatian serius untuk memaju-

kan pendidikan, agar pendidikan di Kabupaten Karangasem dapat bersaing dan memenuhi standar mutu," kata Bupati Karangasem Mas Sumatri saat membuka rembuk pendidikan tahun 2021 di Aula Sabha Widya Praja Disdikpora Kabupaten Karangasem, Kamis.

Pimpinan sekolah dalam Gugus Inti hadir secara lang-

sung secara tatap muka di Aula Sabha Widya Praja Disdikpora tersebut, sedangkan pimpinan sekolah di luar gugus inti mengikuti rembuk pendidikan melalui zoom meeting.

Bupati Mas Sumatri menegaskan, beberapa langkah nyata yang telah digariskan kepada Disdikpora Kabupaten Karangasem dengan anggaran sebesar Rp61,177 miliar yang dirinci Rp29 miliar lebih untuk memperbaiki berbagai sarana dan prasarana pendidikan, seperti ruang belajar, membangun ruang kelas baru, menata halaman sekolah maupun untuk melengkapi berbagai sarana keperluan sekolah.

"Namun, karena banyaknya sekolah yang harus ditangani, tentu masih banyak yang belum terjangkau," katanya.

Dari segi penanaman karakter siswa, Pemkab Karangasem

menganggarkan Rp177 juta lebih untuk membina mental siswa agar memiliki karakter yang baik serta memiliki daya saing yang tinggi dalam mengisi kemerdekaan.

Untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, agar bisa menyekolahkan putra putrinya, baik SD, SMP, Kejar Paket A,B,C, telah dianggarkan dengan total anggaran Rp10 miliar dalam bentuk program KKC (Kartu Karangasem Cerdas).

"Untuk sertifikasi guru, selalu diupayakan, agar terbayar sertifikasinya dan bila ada masalah segera mencari solusi walaupun harus menghadap pemerintah pusat, demi terbayarnya uang sertifikasi bapak-ibu guru," tegasnya.

Selain dana sertifikasi, Pemda juga telah menganggarkan tunjangan kinerja para guru dengan total anggaran sebesar Rp22 miliar lebih. **(ant)**

BRI Salurkan BPUM Hingga 31 Januari 2021

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) hingga 31 Januari 2021 setelah ditetapkan Kementerian Koperasi dan UKM RI.

"Kami menyediakan sistem yang bisa diakses secara real time oleh masyarakat. Jadi sebelum ke kantor BRI, pelaku usaha mikro dapat memastikan terlebih dahulu melalui e-form BRI," kata Direktur Mikro BRI Supari dalam keterangan pers di Jakarta, Senin.

Sejak diluncurkan pemerintah pada Agustus 2020, penyaluran BPUM melalui bank BUMN ini hingga Desember 2020 sudah mencapai Rp18,7 triliun kepada 7,8 juta penerima.

Menurut dia, penyaluran akan tetap mengedepankan penggunaan teknologi dan BRI memastikan distribusi bantuan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Untuk mengetahui sebagai penerima BPUM, ia mengimbau masyarakat mengakses laman <https://eform.bri.co.id/bpum>.

Masyarakat diimbau men-

gakses terlebih dahulu laman tersebut sebelum mendatangi kantor BRI, untuk mencegah terjadinya penumpukan atau antrian penerima BPUM.

Apabila masyarakat tersebut merupakan penerima BPUM, maka dapat segera menghubungi Kantor Cabang BRI terdekat untuk mengecek waktu atau jadwal pencairan.

Pencairan BPUM dilakukan secara bertahap sesuai tanggal yang ditentukan BRI sesuai kapasitas kantor demi menghindari terjadinya kerumunan.

Penerima BPUM bisa datang mengambil haknya dengan membawa identitas diri, agar sesuai dengan data penerima yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Dalam melaksanakan pelayanan pencairan BPUM, Unit Kerja BRI berkoordinasi dengan berbagai pihak, di antaranya dengan Satgas COVID-19, pemda dan pihak berwajib lain untuk mengatur kegiatan pelayanan BPUM.

Program BPUM diluncurkan pemerintah dalam program Pe-



Perajin menyelesaikan produksi wayang di Ruhiyat Wooden Puppen and Mask di Bandung, Jawa Barat, Senin (7/12/2020). Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebutkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif bagi Usaha Mikro telah tersalurkan sebesar 92 persen atau 11 juta usaha mikro dari total 12 juta usaha mikro. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/ws.j.

mulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu masyarakat yang memiliki usaha mikro, agar tetap bertahan dan bisa melewati masa sulit akibat pandemi.

BPUM diberikan secara langsung dengan nominal mencapai Rp2,4 juta kepada pelaku usaha

mikro yang telah memenuhi persyaratan.

Syarat tersebut antara lain Warga Negara Indonesia, mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK), memiliki usaha mikro, bukan ASN, TNI/POLRI, serta bukan pegawai BUMN/BUMD. **(ant)**

CCAI Latih Pelaku UMKM Bali Terdampak COVID-19



Salah seorang pelaku usaha dan UMKM yang dilatih Coca-Cola Amatil Indonesia (CCAI) - Balinusa Operation, untuk mengembangkan bisnis melalui program pelatihan bertajuk "Medagang Kreatip" guna membantu masyarakat terdampak pandemi COVID-19 (Foto Antara News Bali/HO CCAI Balinusa/2020)

COCA-COLA Amatil Indonesia (CCAI) - Balinusa Operation, melatih para pelaku usaha dan UMKM untuk mengembangkan bisnis melalui program pelatihan bertajuk "Medagang Kreatip" guna membantu masyarakat Bali yang terdampak pandemi COVID-19.

"Kondisi pandemi memberikan dampak yang cukup signifikan di

Pulau Bali dengan pertumbuhan ekonomi minus 10,98 persen yang lebih rendah dari pertumbuhan nasional, sehingga pemutusan pekerjaan bagi karyawan, khususnya bidang pariwisata, meningkat," kata Corporate Affairs Executive CCAI - Balinusa Operation, Made Pranata Wibawa Ade Putera, dalam keterangan tertulis

yang diterima, Rabu.

Saat ini, karyawan yang mengalami PHK akhirnya banyak yang beralih menjadi "warung berjalan" dengan menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari demi beradaptasi dengan situasi dan tentunya mencukupi kebutuhan hidup di tengah pandemi COVID-19.

Oleh karena itu, CCAI bersama para pelaku usaha dan juga UMKM terdampak, melakukan inisiatif program-program yang tentunya dapat membantu menjadi alternatif pendukung bagi para pelaku usaha dalam upaya menjaga keberlanjutan perekonomian.

Program bertajuk "Medagang Kreatip" yang salah satunya diinisiasi dengan konsep program pelatihan bisnis kepada para pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis yang sedang dijalani.

Program dengan konsep pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan soft skill para pelaku usaha

dalam mengembangkan bisnis. Program pelatihan ini dijalankan CCAI dengan menggandeng Yayasan BEDO yang memiliki fokus terhadap pengembangan UMKM di Bali.

"Target pengembangan program ini adalah outlet/warung yang selama ini sudah bergerak bersama CCAI, namun juga para pelaku usaha lainnya yang merasakan dampak signifikan dari pandemi dalam mengembangkan usaha yang mereka miliki," kata Regional Corporate Affairs Manager CCAI, Armytanti Hanum Kasmito.

Program pelatihan ini diikuti oleh 95 pelaku usaha dengan delapan modul pelatihan diantaranya Adaptasi Usaha dan Strategi Dagang Kreatif, Kelas Keterampilan, Berjualan lewat WA Business, Menjaring Konsumen lewat FB/IG, Perhitungan Biaya dan Harga Jual, Pembukuan Sederhana, Bisnis Model Canvas Sederhana, dan Pelatihan Keterampilan. **(ant)**

Merchant QRIS di Bali Naik 580 persen Selama 2020

Bank Indonesia mencatat jumlah merchant Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Provinsi Bali sepanjang 2020 sudah sebanyak 173.401 merchant atau meningkat sebesar 580 persen dibandingkan kondisi akhir tahun 2019.

"Akseptansi dan perluasan QRIS di Bali selama tahun 2020 sangat masif dan mengembirakan, yang terlihat dari capaian jumlah merchant QRIS dan transaksi yang terus meningkat," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho di Denpasar, Senin.

Dengan peningkatan jumlah merchant QRIS di Provinsi Bali dari sebanyak 25.493 merchant pada akhir 2019 menjadi 173.401 pada 2020, telah menempatkan Provinsi Bali dari sebelumnya peringkat 12 secara nasional menjadi menduduki peringkat 8 jumlah pengguna QRIS terbesar secara nasional.

Menurut Trisno, yang men-

jadi faktor pendukung penerimaan QRIS di Bali terutama karena keunggulan QRIS itu sendiri dengan tagline UNGGUL yang merupakan singkatan dari UNiversal, Gampang, Untung, dan Langsung.

"Univer-sal artinya standar yang digunakan mengacu pada standar inter-nasional



Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho (Antara/Rhisma/2020)

sehingga tidak hanya bisa menghubungkan transaksi di dalam negeri juga di luar negeri. Sedangkan Gampang, transaksi dengan mudah dilakukan dengan hanya satu genggaman digital melalui HP," ujarnya.

Kemudian Untung memberikan keuntungan bagi semua pihak, baik pengguna maupun pedagang karena ada efisiensi. Sementara Langsung artinya transaksi langsung seketika diproses dan uang langsung diterima.

Di samping itu, lanjut Trisno, QRIS cocok dengan protokol

kehatan di masa pandemi, jaga jarak dan menghindari kerumunan, karena dengan QRIS, transaksi dapat dilakukan tanpa bertemu fisik dengan pedagang atau bisa dilakukan dari jarak jauh.

"Tidak perlu antri, pesanan langsung diterima dan barang dapat segera dikirim. Jadi, tanpa ke luar rumah transaksi dapat dilakukan karena QRIS sarana pembayaran nontunai yang berbasis digital dan nirsentuh," ucapnya.

Strategi kampanye QRIS yang sesuai dengan protokol kesehatan inilah, lanjut Trisno, yang akan terus digaungkan dan disosialisasikan bekerja sama dengan 38 PJSP (penyelenggara sistem pembayaran) dan stakeholder pemerintah. **(ant)**

Tarif Listrik Periode Januari-Maret 2021 Tidak Naik

KEMENTERIAN ESDM memutuskan tarif listrik non subsidi untuk periode Januari-Maret 2021 untuk 13 golongan pelanggan non subsidi tetap atau tidak mengalami perubahan.

Keputusan tersebut itu mengacu pada tarif listrik pada Triwulan IV 2020 mengalami penurunan, setelah tidak ada perubahan tarif sejak tahun 2015.

"Kami selalu siap menjalankan apa yang telah diputuskan oleh regulator. Dengan tidak naiknya tarif listrik ini harapannya dapat menjaga stabilitas dan daya beli masyarakat serta mendukung pemulihan ekonomi nasional di situasi pandemi COVID-19 ini," kata Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN Agung Mardifi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Selain itu, pemerintah juga menyatakan tarif listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi lainnya tidak mengalami perubahan. Itu juga mencakup usaha mikro, kecil, dan menen-

gah (UMKM), bisnis kecil, industri kecil, dan kegiatan sosial.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2020, apabila terjadi perubahan terhadap realisasi indikator makro ekonomi yang dihitung secara tiga bulanan, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap tarif tenaga listrik.

Mengutip siaran pers Kementerian ESDM, meskipun terjadi kenaikan pada empat parameter ekonomi makro tersebut, tarif tenaga listrik untuk pelanggan non subsidi baik tegangan rendah, tegangan menengah maupun tegangan tinggi tetap mengacu pada tarif periode sebelumnya Oktober-Desember 2020 atau tarif tetap.

Tarif listrik pelanggan non subsidi untuk pelanggan Tegangan Rendah (TR) seperti pelanggan rumah tangga dengan



Petugas PLN saat memeriksa pemaknaan meter.

daya 1.300 VA, 2.200 VA, 3.500 sd 5.500 VA, 6.600 VA ke atas, pelanggan bisnis dengan daya 6.600 sd 200 kVA, pelanggan pemerintah dengan daya 6.600 sd 200 kVA, dan penerangan jalan umum tarifnya tetap yakni Rp 1.444,70/kWh.

Sedangkan khusus untuk pelanggan rumah tangga 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM) tarifnya tetap Rp 1.352/kWh.

Pelanggan Tegangan Menengah (TM) seperti pelanggan bisnis, industri, pemerintah dengan daya >200 kVA, dan layanan khusus tarifnya tetap, rerata Rp 1.114,74/kWh.

Sedangkan bagi pelanggan Tegangan Tinggi (TT) yang digunakan oleh industri dengan daya >= 30.000 kVA ke atas tarifnya juga tidak mengalami perubahan yaitu Rp 996,74/kWh. **(ant)**